

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG

Amar Marcahya¹, Tati Sarihati², Yeti Rohayati³
amare84juve@gmail.com¹, sarihati.tati@gmail.com², yetirohayati@gmail.com³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang, Kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan solusi yang dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, dan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tentang kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kajian implementasi menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mengukur implementasi kebijakan berdasarkan tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, dan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian diperoleh, yaitu: (1) Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasinya sudah berjalan dengan baik; (2) Terdapat kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang, terutama dalam proses pendataan; dan (3) Solusinya adalah melalui pemetaan yang tepat pihak-pihak yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan, sosialisasi yang tersusun dan terencana, dan pelibatan pihak lain yang dalam proses pendataan. Kesimpulan dari penelitian adalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, walaupun dihadapi sejumlah kendala, namun terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu terjadinya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cisarua, dan Kabupaten Sumedang secara keseluruhan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of poverty alleviation policies in Sumedang Regency, obstacles in implementing these policies, and solutions taken to overcome these problems. The research method used in this study is qualitative research. The subjects of this study are the Social and Women's Empowerment and Child Protection Services of Sumedang Regency, and parties related to poverty policies in Sumedang Regency. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The implementation study uses the Van Meter and Van Horn implementation model which measures policy implementation based on clear objectives and standards, resources, quality of interorganizational relationships, characteristics of implementing organizations, dispositions, and political, social, and economic environments. The results of the study obtained, namely: (1) Implementation of poverty alleviation policies in Sumedang Regency based on the results of the study can be concluded that the implementation has been running well; (2) There are obstacles in the implementation of poverty alleviation policies in Sumedang Regency, especially in the data collection process; and (3) The solution is through proper mapping of the parties involved in the implementation of the policy, continuous and planned socialization, and the involvement of other parties in the data collection process. The conclusion of the research is that the implementation of the poverty alleviation policy, although faced with a number of obstacles, was carried out well and in accordance with the objectives to be achieved, namely poverty alleviation in Cisarua District and Sumedang Regency as a whole.

Keywords : Policy Implementation, Poverty Alleviation, Cisarua District, Sumedang Regency.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menurut Hall dan Midgley merupakan suatu kondisi deprivasi sosial dan materi yang mendorong individu memiliki kehidupan di bawah standar hidup layak, atau juga dapat diartikan sebagai kondisi sebuah individu mengalami deprivasi relatif jika dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam kelompok masyarakat (Nurhasanah et al., 2019). Konsep kemiskinan juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakcukupan penduduk memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan oleh pengeluaran per kapita perbulannya masih di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

Salah satu indikator terpenting keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu masalah utama dalam bidang pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur dengan perubahan garis kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan resesi. Dalam konteks seperti itu, kemiskinan berkaitan erat dengan daya tampung dan jumlah penduduk daerah tersebut.

Kemiskinan digambarkan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan kualitas hidup yang buruk. Secara umum, kemiskinan menurut BPS didefinisikan sebagai suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Umar et al., 2023).

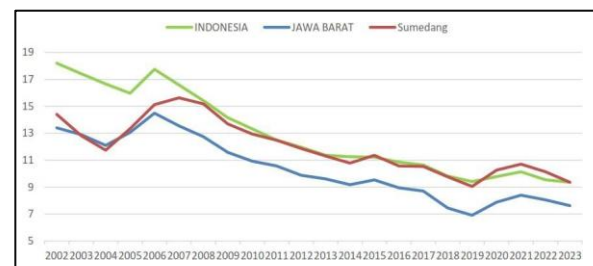
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan di negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan walaupun hasil yang didapatkan belum terlalu seperti yang diharapkan. Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dan dapat menikmati kekayaan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam vital yang dimiliki adalah seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh negara demi

kepentingan dan juga kemakmuran rakyat Indonesia.

Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Ukuran yang digunakan para analis dalam menetapkan jumlah penduduk miskin cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin apabila dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan asupan kalorinya minimal 2.100 kilokalori per hari per kapita, atau pemenuhan kebutuhan pokok non makanan (Rindiani dan Hartatik, 2020).

Kecamatan Cisarua merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Sumedang. Kecamatan Cisarua merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (2024), Jumlah penduduk di Kecamatan Cisarua adalah

21.360 jiwa dan merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat.

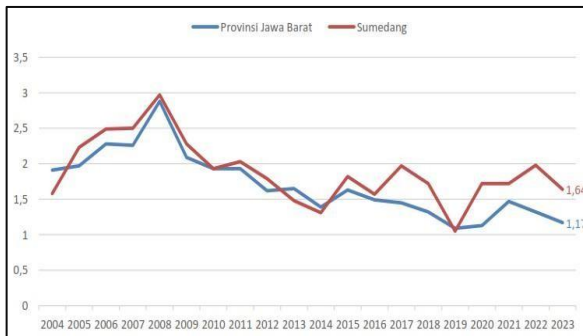


Gambar 1. Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih di atas tren tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi lokal, tetapi juga memberikan gambaran tentang kontribusi wilayah tersebut terhadap total jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Dalam analisis ini, data menunjukkan bahwa meskipun

Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, kontribusinya terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin menurun.

Permasalahan berikutnya adalah kesulitan ekonomi pada warga Kabupaten Sumedang, termasuk Kecamatan Cisarua. Adanya kesulitan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat lokal, yang dapat mengakibatkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana tercermin dalam indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang.



Gambar 2. Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Gambar 2. diperoleh bahwa tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Kemudian, di Kecamatan Cisarua, umumnya di Kabupaten Sumedang juga masih kurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga menimbulkan peningkatan risiko kemiskinan kronis dan peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan. Kondisi tersebut digambarkan dari data keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang, termasuk didalamnya adalah Kecamatan Cisarua.

Data-data tersebut, dilakukan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang

dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (Ditjen Bangda Kemendagri RI, 2021).

Kabupaten Sumedang, khususnya Kecamatan Cisarua memiliki tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih besar dari Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Implikasi dari kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara umum, masih ada tantangan yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang.

Hingga saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah di setiap daerah. Aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang andal untuk dapat mengetahui pola atau faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat menjadi alat yang ampuh bagi pembuat kebijakan untuk menarik perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin. Selanjutnya dengan mengetahui pola kemiskinan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kemiskinan pemerintah, membandingkan kemiskinan di berbagai waktu dan wilayah, dan menysasar masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia. Kemiskinan melemahkan kualitas sumber daya manusia, mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Ada juga masalah kemiskinan merupakan masalah yang berkaitan dengan faktor sosial, seperti meningkatnya kriminalitas di kota-kota besar, munculnya permukiman kumuh, memburuknya kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Telau et al., 2021).

Pola penyebab kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal, yang pertama adalah pendapatan. Kedua adalah pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan sangat berkaitan erat. Kemiskinan

diartikan juga sebagai kegagalan dalam pendidikan. Ketiga, kesehatan merupakan aspek penting dari kesejahteraan manusia sebagai aset manusia untuk meningkatkan kapasitas individu. Terakhir, konsumsi (pengeluaran) adalah pemanfaatan barang atau jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Auliah, 2019).

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang selalu menjadi prioritas pembangunan dari waktu ke waktu, mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan dan cenderung fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga berpedoman pada RPKD Kabupaten Sumedang 2025-2029. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Arah penanggulangan kebijakan kemiskinan di Kabupaten Sumedang tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi saja, melainkan juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya setempat atau kearifan lokal. Sebagai contoh budaya malu untuk dikatakan sebagai warga miskin, nyatanya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Program penanggulangan kemiskinan masih sering terjadi tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena masih terdapat warga yang sudah masuk dalam kategori mampu namun masih menerima bantuan dari pemerintah sehingga tidak malu untuk dikategorikan sebagai warga miskin. Kasus seperti ini menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka kemiskinan yang terjadi secara nyata dari sudut pandang sosial budaya masyarakatnya.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan, yaitu: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat merupakan konsep dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup atau pengeluaran yang harus ditanggung oleh rumah tangga miskin atau rentan. Strategi ini mengakui bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah beban

pengeluaran yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang rendah. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memungkinkan masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan merujuk pada strategi khusus mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah atau kelompok tertentu. Ini mengakui bahwa kemiskinan tidak merata di seluruh wilayah dan bahwa ada daerah atau kelompok-kelompok tertentu yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tersebut, maka prioritas RPD Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 terkait pengurangan kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan sosial, penyediaan pangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meperluas lapangan kerja serta fasilitasi kewirausahaan. Sementara itu, dalam upaya penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang, Pemkab Sumedang mengeluarkan Peraturan Bupati Sumedang terkait penanganan kemiskinan adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 110 Tahun 2019. Perbup ini mengatur rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga memiliki peraturan bupati lain terkait penanganan kemiskinan, yaitu Perbup Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2020. Perbup ini mengatur penyelenggaraan program rantang simpati bagi lanjut usia miskin telantar. Dalam upayanya yang lebih serius, Bupati Sumedang pada tahun 2022 memutuskan membentuk Tim Khusus guna menanggulangi kemiskinan di daerahnya, melalui Keputusan Bupati Nomor 381 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023- 2027. Keputusan Bupati tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang mengentaskan kemiskinan secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan terlaksana sesuai dengan target, yaitu pada tahun 2024-2025 kemiskinan dapat dihapuskan (0%).

Pokok bahasan ini adalah masalah kemiskinan di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Cisarua masih menjadi pertanyaan krusial. Hal ini tentu berkaitan erat dengan masalah kemiskinan dan implementasinya. Soren C. Winter dalam (Fidarina dan Suci, 2022) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat penting dari perumusan kebijakan hingga evaluasi kebijakan sendiri merupakan hubungan antara proses politik dan pemerintahan. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan dari mana ia muncul untuk formula politik. Selain itu, tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut juga sangat tinggi faktor sosial ekonomi dimana kebijakan dibuat.

Banyak teori implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemkab Sumedang) dalam menghapuskan kemiskinan, diantaranya adalah implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Terdapat enam aspek yang diukur untuk mengetahui keefektifan implementasi kebijakan didasarkan oleh implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, yaitu: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya manusia, (3) Kesesuaian Personel, (4) Komitmen Pelaksana, (5) Koordinasi & Interaksi, dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik (Agustino, 2018:141). Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih kepada mengukur dan menjelaskan tentang pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya. Atas dasar itulah, maka kajian mengenai implementasi kebijakan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Sumedang dapat kaji berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sumedang, namun dalam implementasinya di beberapa daerah (kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Sumedang) masih belum mampu mengentaskan kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan juga

analisis mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, sehingga program tersebut dapat sesuai dengan permasalahan kemiskinan di daerah. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan memiliki kecenderungan mengadopsi dari program pemerintah pusat sehingga tidak ada inovasi dan menyebabkan diskresi terhadap kebijakan dan permasalahan yang ada. Pemikiran inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk mengidentifikasi kebijakan kemiskinan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang dan selanjutnya mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang, upaya penurunan kemiskinan di Kecamatan Cisarua termasuk belum efektif dibandingkan dengan sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2024, dari 62 keluarga miskin hanya 9 keluarga saja atau 14,52% yang dapat ditanggulangi. Hal tersebut berbeda dengan sejumlah kecamatan yang berhasil menurunkan keluarga miskin secara signifikan, seperti Kecamatan Cimanggung, Wado, dan Situraja. Bahkan Kecamatan Jatinunggal mampu menghapuskan (0%) kemiskinan di daerahnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Cisarua melalui bantuan uang tunai untuk penduduk usia lanjut dan pencarian/penyaluran pekerjaan bagi usia produktif yang tidak bekerja dan yang sudah bekerja tetapi pendapatannya sangat rendah belum terlaksana secara efektif.

Penelitian ini berupaya mengkaji strategi yang tepat dalam penanganan kemiskinan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti penelitian Setiawan dan Jamaliah (2023). Penelitiannya menemukan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah sangat berkaitan dengan strategi pengentasan masalah sosial kemiskinan. Melalui program yang diusung sebenarnya sudah bekerja dengan baik dengan mengusung program program terbaru di tiap periode pemimpinnya. Juga penelitian yang dilakukan oleh Wisnutama et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 penanganan kemiskinan melalui menambah pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran, upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam penanggulangan kemiskinan telah berjalan efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah menyiapkan berbagai program pemerataan pembangunan di setiap kecamatan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, pekerjaan, serta partisipasi masyarakat

Implementasi pelayanan dianggap sebagai faktor kunci dalam diferensiasi dan keunggulan layanan dan merupakan sumber potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sehingga pemahaman dan perbaikan kualitas merupakan tantangan penting bagi semua organisasi pelayanan kesehatan. Kualitas layanan didefinisikan sebagai perbedaan antara persepsi pelanggan tentang layanan dan harapan mereka tentang penawaran layanan suatu organisasi. Persepsi harapan pelanggan (pasien) tentang standar pelayanan ideal didasarkan dari pengalaman mereka sebelumnya dalam penggunaan layanan.

Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, serta bermutu. Pengertian mutu yang dimaksud adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang akan mendukung proses pemulihan kesehatan pasien yang dirawat, serta kualitas pelayanan keperawatan akan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien dan akan memunculkan suatu persepsi tentang kepuasan terhadap pelayanan yang diterima (Rahmat, 2019).

Pelayanan yang diberikan perawat pelaksana dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien rawat inap. Sehubungan dengan hal itu dari banyaknya jumlah perawat, juga dapat menekankan pada masing-masing perawat untuk selalu bertindak kompeten melakukan sesuai SOP yang berlaku di rumah sakit agar dapat lebih meningkatkan kepuasan dan mensejahterakan pasien rawat inap.

Selain kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit, kompetensi perawat sangat menentukan besarnya kepuasan pasien.

Kompetensi Perawat merupakan tingkat penampilan/kinerja yang meliputi mampu membuat rencana keperawatan, mampu asuh klien dengan diagnosis prioritas, melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sehingga dengan menguasai kompetensi tersebut, maka perawat akan mampu melakukan hal-hal antara lain mengerjakan suatu tugas/pekerjaan (task skills), mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan (task management skills), memutuskan apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula (contingency management skills), sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien (PPNI, 2014).

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, 2014) menguraikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan petunjuk kerja yang di tetapkan serta dapat terobservasi. Kompetensi adalah kualitas dari pribadi atau kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diperlukan (Simamora, 2018:94).

Kompetensi perawat merefleksikan atas kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh individu yang akan bekerja di bidang pelayanan keperawatan. Kompetensi perawat terdiri dari kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Seseorang dikatakan memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, apabila dapat memanfaatkan secara optimal kedua komponen utama kompetensi tersebut (PPNI, 2014). Kompetensi tidak hanya menyangkut bidang ilmu dan pengetahuan metodologi, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap dan keyakinan akan nilai-nilai sosok perawat yang baik dan berpenampilan menarik (Nursalam, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang disusun menggunakan metode tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2020:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2018:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada

ciri- ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 (empat) komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2016:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (2014, kebijakan publik) menyatakan bahwa ada enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, disposisi. Pengaruh keenam faktor tersebut pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang di atas adalah sebagai berikut :

1. **Standar dan Tujuan :** Dalam implementasi kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah tujuan dan standar yang jelas. Menurutnya, suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di implementasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai (Anggara, 2016).
2. **Sumber Daya :** Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. **Karakteristik Organisasi Pelaksana :** Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2016), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2016) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-inti dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota- anggota legislatif dan eksekutif) 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
4. **Komunikasi :** Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami

oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2016), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

5. Sikap dan Kecenderungan para Pelaksana : Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2016) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut, Dan begitu pun sebaliknya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomis dan Politik : Dalam menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2016) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasinya sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teori Van Meter dan Van Horn dengan enam faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, disposisi. Hasil akhir dari implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya penanggulangan kemiskinan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Terdapat kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Kendala tersebut diantaranya identitas penerima bantuan yang tidak lengkap juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh petugas pendata. Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian data yang ada dalam KTP dan KK dengan data yang tercatat di Kantor Desa/Disdukcail. Kemudian kendala lainnya adalah adanya warga berstatus

miskin namun tidak terdaftar dalam data by name by address di Kantor Desa.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan diantaranya melakukan pemetaan terhadap para pihak yang terkait dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya lainnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua pihak, baik pihak terkait maupun masyarakat yang teridentifikasi sebagai warga miskin. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya sejumlah kendala adalah melakukan pendataan dengan melibatkan pihak-pihak lainnya. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, maka kesalahan data dapat diminimalisir, dan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan agar implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang dilakukan lebih efektif dan hasilnya optimal sebagai berikut :

1. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam mendata warga yang berstatus miskin sebaiknya lebih selektif dan secara rutin memantau perkembangan keadaan warga di sekitar lingkungannya, karena sering terjadi ketidaksesuaian data yang ada di laporan dengan di lapangan
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan dan menyediakan lebih beragam lagi program, bukan hanya yang bersifat instant, tetapi bersifat berkelanjutan, seperti bantuan usaha dengan disertai pemberian pelatihannya, sehingga dalam pelaksanaannya mereka bisa sukses menjalankannya.
3. Perlu adanya pemantauan kembali bagi para warga yang termasuk miskin, yang sudah menerima bantuan lain sebelumnya, untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan pemerintah sebelumnya tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Sedangkan untuk warga berstatus miskin yang berhasil dapat dijadikan contoh bagi warga lainnya.

Selain saran-saran yang telah disampaikan di atas, saran lain yang dapat peneliti sampaikan tidak lain untuk peneliti selanjutnya bahwa perlu dilakukan lagi penelitian lebih mendalam terkait dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat, terlebih khusus pada keseluruhan sasaran yang tidak terfokuskan pada penelitian ini. Saran-saran yang diberikan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau perbaikan untuk program-program yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2018. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Alhudori, H. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*, 1(1)
- Anggara, S. 2016. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Auliah, R. 2019. Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Universitas Pasundan
- Darmadi, H. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Edward III, G. C. 1984. *Implementating Public Policy*. Washington: CQ. Press Fidarina,
- F. R. dan Suci, M. 2022. Implementasi Kebijakan Pusat. *Inkubasi Bisnis*.
- Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi, 10(4), 1283-1292
- Hamidi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hamin, K. et al. 2023. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2052–2059
- Handyaningrat, S. 2014. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Islambay, (2020). *Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto*

- Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2)
- Islamy, M. Irfan. 2019. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Jacobus, Kindangen, P., dan Walewangko, E. N. (2021). Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Keban, Y. 2017. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Issu*. Yogyakarta: Grava Media.
- Krisnamurthi. (2018). Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Gari Kemiskinan. *Jurnal Gizi dan Pangan*
- Kriyantono, R. 2018. *Teknik Praktis Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Publik, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maryadi, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Maulidiyah, F. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 3(1).
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mustika, C. (2011). Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4)
- Nawawi, H. dan Martini. 2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, T. 2018. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineke Cipta Ningrat, B. S. 2022. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta Nugroho, R. 2020. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nurhasanah, N., Safri, M., & Edi, J. K. 2019. Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(3), 161-169
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Putrakunto, M. 2019. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rasyid, M. R. 2016. *Makna Pemerintahan:Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Rindiani, R., & Hartatik, S. 2020. Pola Konsumsi Pangan dan Asupan Makanan Penduduk Miskin di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 20(1), 13-18
- Sa'diyah, Y. H. dan Arianti, F. (2018). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1(1)
- Setiawan, I. dan Jamaliah, J. 2023. Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), 399- 405.
- Siagian, S. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara Soetomo. 2015. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Suandi, dkk. 2016. *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suyanto, B. dan Sutinah. 2016. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya : Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kepulauan, Perkotaan dan Dampak Dari Pembangunan di Indonesia*. Malang: Malang Intrans Publishing
- Syafiie, I. K. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama Tangkilisan, H. N. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- YPAPI
- Tarigan, A. 2016. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jakarta: Bappenas
- Telau, Y., Engka, D. S. ., & Rompas, W. I. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005- 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 25-35
- Toha, M. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tim KPKD. 2024. *Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024*. Sumedang: BP4D Sumedang
- Umar, D. A., dkk. 2023. Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 12-25
- Wahab, S.A. 2020. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waldo, D. 2017. *Pengantar Studi Administrasi*. (Terj.) Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Aksara Baru
- Wibawa, dkk. 2019. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2017. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wisnutama, A., Pramono, J., dan Haryanto, A. T. 2023. Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2), 1-12